



Bupati Serahkan DPA

Kepala SKPD Harus Tingkatkan Kinerja

SUNGAI RAYA - Setelah belum lama ini melantik ratusan pejabat eselon II, III dan IV, Selasa (10/2) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD 2015 bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

"Dengan diteruskannya DPA ini saya berharap semua pegawai terutama Kepala SKPD bisa memotivasi diri untuk selalu meningkatkan pelayanan publik serta menjalankan tugas serta tanggungjawabnya," kata Bupati Kubu Raya, Rusman Ali.

Dalam kesempatan yang sama, seluruh satuan unit kerja di jajaran pemerintah Kubu Raya juga menandatangani pakta integritas. Isi pakta integritas itu adalah, dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD 2015 menyatakan tidak melakukan praktik korupsi kolusi dan nepotisme. "Karena telah menandatangani pakta integritas, tentu berkewajiban untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Rusman Ali berharap semua aparatur pemerintah Kubu Raya bisa mengikuti proses pelaksanaan APBD 2015 secara bersih, transparan dan profesional untuk hasil yang lebih baik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

"Jika melanggar dalam pakta integritas yang telah disepakati selayaknya juga bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku," ucapnya.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai

anggota DPR RI ini menilai koordinasi dan kerjasama, antar SKPD sangat penting dilakukan dalam optimalisasi menjalankan program kerja dan target yang telah dibuat.

"Dengan diteruskannya DPA pada hari ini berarti semua aktivitas pembangunan dan pemerintahan di jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya siap dilaksanakan atas dasar dokumen yang jelas dan terencana," jelasnya, seraya mengatakan DPA merupakan dasar bagi penggunaan anggaran untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga pagu anggaran masing-masing SKPD yang ada.

"Saya juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah baik penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban hingga ke pelaporan akan semakin baik," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Rusman Ali juga meminta agar SKPD dalam melaksanakan pengelolaan anggaran mengikuti mekanisme yang ada sehingga mampu mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang direncanakan bisa direalisasikan mulai tahun 2015 ini.

"Saya juga berharap agar pejabat di lingkungan Kubu Raya menyadari dan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik. Serta mencari dan menemukan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan prestasinya yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan di Kubu Raya," pungkasnya. (ash)